



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

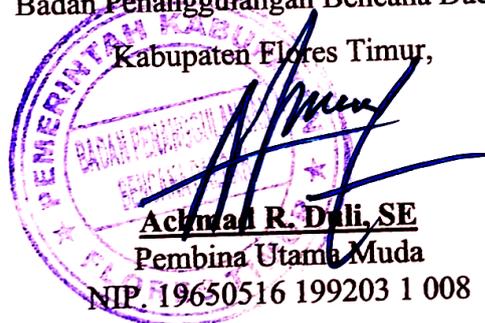
JLN. SARABITI - KEL. SAROTARI TIMUR TELP/FAX. (0383) 22276
email : bpbd_kab.flotim@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja PD menjadi landasan atau pedoman bagi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja PD ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

Plt.Kepala Pelaksana

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur,**



Achmad R. Duli, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	Hal
1.1	LATAR BELAKANG.....	1
1.2	LANDASAN HUKUM.....	2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	6
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.3	ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	22
2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	29
2.5	PENELAAHAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT.....	36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	TELAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	37
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	39
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V	PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2023	7
Tabel II.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
Tabel II.2.1	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Permasalahan Pelayanan Provinsi/Kabupaten/Kota.....	23
Tabel II.2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong K/L.....	25
Tabel II.4	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	29
Tabel II.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur.....	36
Tabel III.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	39
Tabel III.3	Rumusan Rancangan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan Maju Tahun 2026.....	41
Tabel IV.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025.....	51

SALINAN



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
 6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
 7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2025, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII Penutup
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPERIDA untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPERIDA menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025.
- (2) Kepala BAPPERIDA melakukan evaluasi RKPD Tahun 2025 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 Juli 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja Organisasi Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Proses penyusunan Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Flores Timur. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berpedoman pada dokumen RKPD, dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan penanggulangan Bencana Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dengan arah Pembangunan Nasional, Provinsi, dan mendukung arah perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pemabngunan Daerah Kabupaten Flores Timur:
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tetang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timu:
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026:
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025:

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

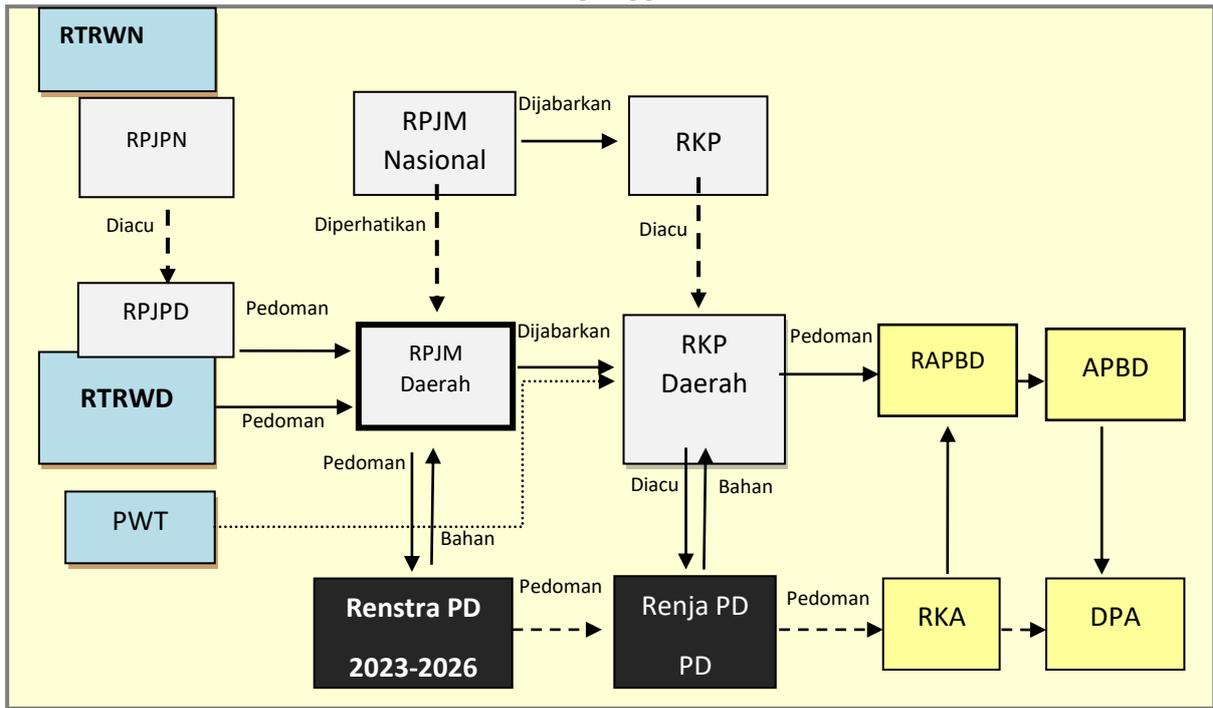
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Penyusunan RKPD ini mengacu pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu juga menggunakan RENJA Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, pada tahapan penganggaran, RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan RAPBD. Dengan

demikian RKPD merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul ketekaitan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di Daerah.

Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1.1

Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 7 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan Daerah.

2. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur adalah:

A. Tujuan Internal

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2. Menyediakan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam masa sekarang dan yang ingin di capai pada periode Tahun 2025, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan.

B. Tujuan Eksternal

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Flores Timur yang berorientasi untuk pembangunan yang mengurangi kerentanan/resiko terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya Penanggulangan Bencana, baik dalam kondisi Pra Bencana, Saat Bencana, Maupun Pasca Bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta, bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki perhatian yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Flores Timur.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana dengan program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di Organisasi Perangkat Daerah lain, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan penanggulangan Bencana Daerah, agar substansi Antar Bab dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Memuat Tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Proses Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah, Keterkaitan Antara Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dokumen RKPD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Menguraikan Apa Yang Menjadi Landasan Hukum di Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan Tentang Maksud Dan Tujuan Dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan Pokok Bahasan Dalam Penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta susunan Garis Besar Isi Dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan penanggulangan Bencana Daerah (

Organisasi Perangkat Daerah)

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3.3. Program Dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisa capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah pemecahan masalah yang diambil dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*Outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*Output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2023). Rencana Kerja 2023 merupakan tahun Lima dari periode RPJM 2017– 2022. Terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan dalam penyusunan renja tahun 2018-2020 dengan penyusunan renja pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan pendekatan regulasi yang digunakan pada periode 2018-2020 adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan penyusunan renja tahun 2021 dan 2022 menggunakan Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

URUSAN	KODE				Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2023 s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2023 s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp		K	Rp	I		II		III			IV			K	Rp		K	Rp	K	Rp
	(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	(16)								
1						Ketentraman Dan Ketertiban Umum		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1-5	0-0	0-0	04			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	95	11,395,190,162		32.3	3,680,033,810	14	506,735,702	21	754,948,262	39	1,446,723,947	13	489,034,944	87	3,197,442,855	269	87	87	3,197,442,855	91	28			
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	95	1,389,002,500		60.9	845,624,840	10	83,579,500	22	185,152,793	49	415,601,164	14	120,108,902	95	804,442,359	156	95	95	804,442,359	100	58			
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10,006,187,662	28.3	2,834,408,970	15	423,156,202	20	569,795,469	36	1,031,122,783	13	368,926,042	84	2,393,000,496	298	84	84	2,393,000,496	84	24			
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100																				
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100		100																				
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100																				
x	x	01	2.01			Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	100	181,354,500	16	65,000,000	3	5,000,000	-	2,400,000	11	51,716,750	2	4,713,000	16	63,829,750	100	98	16	63,829,750	16	35	BPBD		
x	x	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	46,346,150	2	26,000,000	-	-	-	2,400,000	2	22,125,750	-	1,368,000	2	25,893,750	100	100	2	25,893,750	25	56	BPBD		
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	8	42,316,050	2	12,000,000	-	-	-	-	2	10,936,000	-	-	2	10,936,000	100	91	2	10,936,000	25	26	BPBD		
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	46,346,150	6	12,000,000	3	5,000,000	-	-	3	7,000,000	-	-	6	12,000,000	100	100	6	12,000,000	25	26	BPBD		
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	24	46,346,150	6	15,000,000	-	-	-	-	4	11,655,000	2	3,345,000	6	15,000,000	100	100	6	15,000,000	25	32	BPBD		

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	100	7,053,084,128			33	2,206,914,421	0	338,583,316	14	451,139,145	10	751,962,985	9	258,815,317	33	1,800,500,763	100	82	33	1,800,500,763	33	26	BPBD
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN (org/Bln)	23/14	6,897,284,128			21/14	2,142,914,421	21/14	338,583,316	21/14	423,229,145	21/14	733,215,985	21/14	242,169,317	21/14	1,737,197,763	21/14	81	21/14	1,737,197,763	21/14	25	BPBD
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	77,900,000			15	45,000,000	-	-	8	21,300,000	4	13,050,000	3	10,650,000	15	45,000,000	100	100	15	45,000,000	25	58	BPBD
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	72	77,900,000			18	19,000,000	-	-	6	6,610,000	6	5,697,000	6	5,996,000	18	18,303,000	100	96	18	18,303,000	25	23	BPBD
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	20,560,000			1	10,000,000	-	-	-	4,555,000	1	5,436,000	-	-	1	9,991,000	100	100	1	9,991,000	1	49	BPBD
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	20,560,000			1	10,000,000	-	-	-	4,555,000	1	5,436,000	-	-	1	9,991,000	100	100	1	9,991,000	25	49	BPBD
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)	100	41,120,000			13	20,000,000	-	4,525,000	-	-	6	12,404,500	4	2,712,500	13	19,642,000	100	98	13	19,642,000	13	48	BPBD
x	xx	01	2.05	03	Pendataan Dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	48	20,560,000			12	10,000,000	-	-	-	-	5	7,879,500	4	2,102,500	12	9,982,000	100	100	12	9,982,000	25	49	BPBD
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi Dan pelaksanaan Sistik Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	20,560,000			1	10,000,000	-	4,525,000	-	-	1	4,525,000	-	610,000	1	9,660,000	100	97	1	9,660,000	25	47	BPBD
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	100	711,080,854			29	229,287,735	5	33,949,936	5	45,754,924	12	93,890,898	6	53,915,325	29	227,511,083	100	99	29	227,511,083	29	32	BPBD
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	60,615,608			2	1,999,785	-	-	-	-	2	1,999,500	-	-	2	1,999,500	100	100	2	1,999,500	25	3	BPBD
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perengkapam Kantor yang disediakan (Paket)	8	99,949,246			2	20,000,000	-	-	1	9,242,500	1	10,757,500	-	-	2	20,000,000	100	100	2	20,000,000	25	20	BPBD
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	4	24,000,000			1	7,497,950	-	-	-	2,470,000	1	5,027,900	-	-	1	7,497,900	100	100	1	7,497,900	25	31	BPBD
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disiapkan (Paket)	4	181,354,500			1	47,000,000	-	6,939,996	-	11,697,424	1	27,943,399	-	-	1	46,580,819	100	99	1	46,580,819	25	26	BPBD

x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	98,250,000		2	25,000,000	-	-	-	2,350,000	2	16,734,275	-	5,915,325	2	24,999,600	100	100	2	24,999,600	25	25	BPBD	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan (dokumen)	4	4,010,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	60,451,500		12	30,900,000	3	7,400,000	2	4,190,000	3	6,950,000	4	12,360,000	12	30,900,000	100	100	12	30,900,000	25	51	BPBD	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	182,450,000		8	96,890,000	2	19,609,940	2	15,805,000	2	24,478,324	2	35,640,000	8	95,533,264	100	99	8	95,533,264	25	52	BPBD	
x	x	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	60,000,000		100	14,171,250	-	-	-	-	-	-	1	9,052,000	100	9,052,000	100	64	100	9,052,000	100	15	BPBD	
x	x	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	100	60,000,000		2	14,171,250	-	-	-	-	-	-	1	9,052,000	2	9,052,000	100	64	2	9,052,000	2	15	BPBD	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1,377,988,180		100	193,884,814	9	40,173,950	11	61,856,400	14	69,333,650	2	10,412,150	100	181,776,150	100	94	100	181,776,150	100	13	BPBD	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan)	48	8,060,200		12	1,500,000	4	550,000	4	500,000	4	402,000	-	48,000	12	1,500,000	100	100	12	1,500,000	25	19	BPBD	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	48	202,005,000		12	49,984,814	2	6,023,950	3	10,956,400	6	26,531,650	1	2,364,150	12	45,876,150	100	92	12	45,876,150	25	23	BPBD	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	48	1,167,922,980		12	142,400,000	3	33,600,000	4	50,400,000	4	42,400,000	1	8,000,000	12	134,400,000	100	94	12	134,400,000	25	12	BPBD	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Unit)	100	561,000,000		42	95,150,750	-	924,000	2	4,090,000	23	46,378,000	12	29,305,750	42	80,697,750	100	85	42	80,697,750	42	14	BPBD	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	104	344,000,000		26	70,250,750	-	735,000	1	3,355,000	15	32,688,000	10	19,740,750	26	56,518,750	100	80	26	56,518,750	25	16	BPBD	
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	100	12,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	6	135,000,000		3	5,000,000	-	-	-	-	3	5,000,000	-	-	3	5,000,000	100	100	3	5,000,000	50	4	BPBD	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	16,000,000		1	15,000,000	-	189,000	-	155,000	-	5,040,000	1	9,143,000	1	14,527,000	100	97	1	14,527,000	33	91	BPBD	
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana Prasarana Gedung kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	27	54,000,000		7	4,900,000	-	-	1	580,000	5	3,650,000	1	422,000	7	4,652,000	100	95	7	4,652,000	26	9	BPBD	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	100	1,389,002,500		61	845,624,840	10	83,579,500	22	185,152,793	49	415,601,164	14	120,108,902	95	804,442,359	156	95	95	804,442,359	95	58	BPBD	
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	100	813,250,000		66,67	272,384,840	5	12,567,280	24	65,936,000	37	101,673,600	24	64,719,745	90	244,896,625	#####	90	90	244,896,625	90	30	BPBD
						Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100	370,752,500		75,78	519,590,000	11	59,145,940	18	93,581,793	58	299,590,082	11	55,389,157	98	507,706,972	#####	98	98	507,706,972	98	137	BPBD
						Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	100	205,000,000		16,79	53,650,000	22	11,866,280	48	25,635,000	27	14,337,482	-	-	97	51,838,762	#####	97	97	51,838,762	97	25	BPBD
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	225,000,000		129	55,735,000	3	12,567,280	62	14,175,000	64	24,969,250	-	1,570,750	129	53,282,280	100	96	129	53,282,280	129	24	BPBD	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	9	110,000,000		9	35,000,000	3	12,567,280	2	5,295,000	4	15,243,750	-	1,206,250	9	34,312,280	100	98	9	34,312,280	100	31	BPBD	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	480	115,000,000		120	20,735,000	-	-	60	8,880,000	60	9,725,500	-	364,500	120	18,970,000	100	91	120	18,970,000	25	16	BPBD	
1	05	03	2.02		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	320,000,000		100	196,650,000	-	-	30	51,481,000	45	67,277,760	16	53,098,995	100	171,857,755	100	87	100	171,857,755	100	54	BPBD	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	3	65,000,000		1	75,000,000	-	-	-	2,840,000	-	11,582,260	1	40,903,995	1	55,326,255	100	74	1	55,326,255	33	85	BPBD	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	240	70,000,000		60	76,650,000	-	-	30	45,716,000	30	30,030,500	-	-	60	75,746,500	100	99	60	75,746,500	25	108	BPBD	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	120	110,000,000		30	45,000,000	-	-	-	2,925,000	15	25,665,000	15	12,195,000	30	40,785,000	100	91	30	40,785,000	25	37	BPBD	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi		75,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	370,752,500		75.8	519,590,000	25	59,145,940	75	93,581,793	36	299,590,082	15	55,389,157	98	507,706,972	129	98	98	507,706,972	98	137	BPBD	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	4	80,752,500		1	400,036,000	-	49,685,940	-	54,156,793	1	261,417,082	-	32,000,000	1	397,259,815	100	99	1	397,259,815	25	492	BPBD	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	200	95,000,000		50	84,566,000	-	2,775,000	10	17,805,000	25	36,045,000.0	15	23,389,157	50	80,014,157	100	95	50	80,014,157	25	84	BPBD	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	400	195,000,000		100	34,988,000	25	6,685,000	65	21,620,000	10	2,128,000.0	-	-	100	30,433,000	100	87	100	30,433,000	25	16	BPBD	

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana (Dokumen)	100	473,250,000			7	73,649,840	1	11,866,280	3	25,915,000	2	23,764,072	1	10,050,000	7	71,595,352	100	97	7	71,595,352	7	15	BPBD
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (dokumen)		63,250,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.04	03	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)		120,000,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data Dan Informasi Kebencanaan (Dokumen)	4	85,000,000			1	19,999,840	-	-	-	280,000	-	9,426,590	1	10,050,000	1	19,756,590	100	99	1	19,756,590	25	23	BPBD
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	24	205,000,000			6	53,650,000	1	11,866,280	3	25,635,000	2	14,337,482	-	-	6	51,838,762	100	97	6	51,838,762	25	25	BPBD

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa masih ada Sebagian sub kegiatan yang belum memenuhi target renstra baik itu program rutin maupun program Penanggulangan Bencana Hal ini disebabkan ada beberapa hambatan antara lain:

1. Target yang dipasang dalam Renstra Terlalu Tinggi sehingga tidak tercapai dalam pelaksanaannya
2. Target yang dipasang dalam Renstra terlalu Tinggi Namun Dukungan anggaran masih sangat kurang sehingga berpengaruh langsung pada capaian yang sudah ditargetkan.
3. Dalam tabel Diatas Dapat terbaca Ada beberapa sub kegiatan yang capaiannya melebihi target hal ini disebabkan karena dalam perjalanan kebutuhan akan program bertambah (perubahan SBU dan SSH)
4. Untuk Program Penanggulangan Bencana Ada Beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal hal ini disebabkan karena banyak kejadian bencana baik itu awal tahun,pertengahan tahun bahkan sampai pada akhir tahun anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menyusun dan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penganggulangan Bencana Daerah selain melaksanakan kedua fungsi badan tersebut di atas, unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur juga menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian;
 - Pengkomandoan; dan
 - Pelaksana.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Flores Timur.

c. Kewenangan

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai kewenangan :

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana;
3. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam penanggulangan bencana;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana pada wilayah;
5. Perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
6. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana;
7. Pengajuan Penetapan Status Bencana;

8. Pengkoordinasian terhadap Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana;
9. Pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang, penataan ruang, IMB dan peraturan lain dengan pencegahan bencana
10. Penetapan tempat tujuan pemindahan penduduk dari daerah bencana ke daerah yang aman;
11. Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman;
12. Pemulihan sarana fisik dan non fisik yang rusak/lumpuh akibat bencana;
13. Pengawasan terhadap peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Penanggulangan Bencana dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator sesuai tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana terdapat dalam tabel II.2.

Tabel.II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BPBD Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat			12	12	12	12	12	12	12	12	
2	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	12	12	12	12	12	12	12	
3	Jumlah kendaraan dinas/operasional			26	26	26	26	26	26	26	26	
4	Jumlah layanan Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
5	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23/14	23/14	23/14	23/14	23/14	23/14	23/14	23/14	
6	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15	15	15	15	15	15	15	15	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwula/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD			18	18	18	18	18	18	18	18	
8	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12	12	12	12	12	12	12	12	
10	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)			1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor			2	2	2	2	2	2	2	2	
12	Jumlah layanan barang cetakan dan penggandaan			2	2	2	2	2	2	2	2	
13	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			2	2	2	2	2	2	2	2	
14	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD (Laporan)			8	8	8	8	10	8	8	8	
15	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran			12	12	12	12	10	12	12	12	18

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD			18	18	18	18	16	0	18	18	
17	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	2	2	2	
18	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			2	2	2	2	2	2	2	2	
19	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			6	6	6	6	6	6	6	6	
20	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah			6	6	6	6	6	6	6	6	
21	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan			1	1	1	1	0	0	1	1	
22	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
23	Jumlah Jenis Kelengkapan Gedung Kantor			2	2	0	2	4	3	1	2	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang dipelihara			1	1	0	1	1	1	0	1	
25	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			7	7	7	7	6	6	7	7	
26	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disiapkan (Pkt)			1	1	1	1	1	1	1	1	
27	Jumlah unit Peralatan gedung kantor yang dipelihara			7	7	7	6	9	7	7	6	
28	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal			0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB Yang Ditetapkan paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan kaji Cepat (Dok)	√	√	1	1	1	1	1	1	1	1	
30	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pem. Pusat, Pem. Provinsi dan penyaluan ke daerah bencana	√	√	100	100	100	100	237	100	100	100	
31	Jumlah Korban Yang Brehasil Ditemukan,ditolong dan dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	√	√	50	50	50	50	35	50	50	50	
32	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Didaerah	√	√	1	0	1	0	0	1	1	1	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Jumlah Peserta Bimtek TRC pada saat Tanggap Darurat	√	√	30	30	30	30	60	30	30	30	
34	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Yang Dilegalisasi (Dok)	√	√	4	3	2	2	2	2	2	0	
35	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi,Komunikasi Informasi Dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Terhadap penduduk Yang tinggal Di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Yang Ada dikawasan tempat Tinggalnya	√	√	120	120	120	120	198,416	0	120	120	
36	Jumlah Data Dan Informasi Bencana	√	√	1	1	1	1	1	0	1	1	
37	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Yang Dilegalisasi (Dok)	√	√	1	0	1	1	1	1	2	1	
38	Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	√	√	60	60	60	60	771	60	60	60	
39	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	√	√	1	1	1	0	0	1	1	1	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi untuk Bencana Prioritas	√	√	1	0	1	1	2	0	2	1		
41	Jumlah Data Dan Informasi Bencana	√	√	1	1	1	1	1	1	1	1		
42	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam satu tahun	√	√	6	6	6	6	4	0	6	6		

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa

1. Untuk Capaian Program kegiatan Pada Tahun Anggaran 2023 (N-2) secara keseluruhan semuanya berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.
2. Untuk Pencapaian target pada tahun anggaran 2024 (N-1) secara keseluruhan belum bias dievaluasi karena masih dalam pelaksanaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi. Berdasarkan indikator kinerja dan kondisi permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 2. Belum Dilaksanakan Kajian Resiko Bencana
 3. Belum Lengkapnya Dokumen Rencana Kontigensi Dalam rencana Penanggulangan Bencana
 4. Masih kurangnya Kapabilitas aparaturnya yang menangani masalah kebencanaan
 5. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan penanggulangan bencana masih kurang memadai
 6. Ketersediaan Logistik Yang Belum Memadai
 7. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standart Operasi prosedur (SOP) Yang Baku
 8. Masih rendahnya wawasan masyarakat tentang kebencanaan
 9. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih sangat minim
 10. Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsive gender.
- Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

Tabel II.2.1

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Dan Permasalahan Pelayanan Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Melaksanakan Revisi Kajian Resiko Bencana berdasarkan 9 Jenis Ancaman Bencana Di Kabupaten Flores Timur	- Kurangnya Alokasi Anggaran Untuk Melakukan Revisi Dokumen Peta
2.	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana yang terorganisir dan tepat guna (Rencana Kontigensi)	- Masih kurangnya referensi terkait kebencanaan.
3.	Meningkatnya Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.	- Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami kebencanaan
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Monitoring Evaluasi Kebencanaan
5.	Meningkatnya penanganan terhadap bencana kekeringan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Penanganan Bencana Kekeringan
6.	Terlaksananya Identifikasi / Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Identifikasi/Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana

7.	Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)	Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)
8.	Terlaksananya Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
9.	Tersedianya sistem informasi terpadu di bidang kebencanaan.	- Belum adanya sarana penyebarluasan informasi kebencanaan yang lebih cepat dan akurat
10.	Meningkatnya frekwensi Koordinasi Forum PRB	- Kurangnya Alokasi Dana untuk koordinasi dan fasilitasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)
11.	Bertambahnya jumlah anggota TSBD/K	- Belum ada kelanjutan dari pembentukan anggota TSBD/K
12.	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana	- Kurangnya alokasi dana
13.	Jumlah Peserta Bimtek TRC.	- Masih kurangnya SDM Anggota TRC - Belum ada kegiatan untuk memfasilitasi Anggor TRC
14.	Terlaksananya Pengadaan Stok Penyanggah (<i>Buffer Stock</i>) bagi Korban Bencana	- Kurangnya alokasi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mengambil berbagai langkah kebijakan yaitu :

Tabel II.2.2

Faktor Penghambat Dan Pendorong Renstra K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan Revisi Kajian Resiko Bencana berdasarkan 9 Jenis Ancaman Bencana Di Kabupaten Flores Timur	- Kurangnya Alokasi Anggaran Untuk Melakukan Revisi Dokumen Peta	- Kabupaten Flores Timur Merupakan Daerah Yang memiliki Tingkat Ancaman Bencana Yang Sangat Tinggi	- Membirikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi/daerah yang memiliki Ancaman potensi bencana. - Untuk memberikan intervensi kepada lembaga pemerintah dan swasta dalam menentukan arah kebijakan.
2.	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana yang terorganisir dan tepat guna (Rencana Kontigensi)	- Masih kurangnya referensi terkait kebencanaan.	-	-

3	Meningkatnya Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam.	- Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami kebencanaan		Adanya kesadaran para pihak (Pemerintah, Kalangan Swasta/Dunia Usaha, dan masyarakat) bahwa Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab bersama.
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Monitoring Evaluasi Kebencanaan	- Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan. - Masih banyak warga masyarakat yang tinggal di daerah terpapar (Jalur merah).	
5	Meningkatnya penanganan terhadap bencana kekeringan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Penanganan Bencana Kekeringan	- Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kekeringan	
6	Terlaksananya Identifikasi / Penilaian Kerusakan dan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Identifikasi/Penilaian kerusakan dan kerugian pasca		

	Kerugian Pasca Bencana	bencana		
7	Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)	Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)		
8	Terlaksananya Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
9	Tersedianya sistem informasi terpadu di bidang kebencanaan.	- Belum adanya sarana penyebarluasan informasi kebencanaan yang lebih cepat dan akurat	Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kepulauan	
10	Meningkatnya frekwensi Koordinasi Forum PRB	- Kurangnya Alokasi Dana untuk koordinasi dan fasilitasi Forum PRB		
11	Bertambahnya jumlah anggota TSBD/K	- Belum ada kelanjutan dari pembentukan anggota TSBD/K		

12	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana	- Kurangnya alokasi dana		
13	Jumlah Peserta Bimtek TRC.	- Masih kurangnya SDM Anggota TRC - Belum ada kegiatan untuk memfasilitasi Anggor TRC		
14	Terlaksananya Pengadaan Stok Penyanggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana	- Kurangnya alokasi		

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Review atau telaan terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Hasil telaan terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.4
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			94.8	3,963,810,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			94.8	4,331,210,000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Larantuka	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	3,293,810,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Larantuka	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	3,479,210,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	100%	29,208,500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	100%		
		OPD/Larantuka	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)	100%			OPD/Larantuka	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)	100%		
		OPD/Larantuka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%			OPD/Larantuka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%		
1	Perencanaan Penganggaran Dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah			4	53,000,000	Perencanaan Penganggaran Dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah			4	70,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dok	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dok	30,000,000	penambahan 10 juta untuk perjalanan dinas eselon IV ke Propinsi
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dokumen RKA SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6 Lap	10,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dokumen RKA SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6 Lap	15,000,000	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6 Lap	15,000,000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6 Lap	15,000,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6 Lap	8,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6 Lap	10,000,000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	2,661,310,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	2,661,310,000	
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan A	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	23/14 Org/Bln	2,581,310,000	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	23/14 Org/Bln	2,581,310,000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)	12 Dok	65,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)	12 Dok	65,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Lap	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Lap	15,000,000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	15,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	25,000,000	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Lap	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Lap	15,000,000	Tambahan 5 Juta untuk perjalanan dinas dalam daerah oleh bendahara barang beserta staf
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8 Lap	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8 Lap	10,000,000	Tambahan 5 Juta Untuk Belanja Lembur

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	75,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	120,000,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1 Pkt	70,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1 Pkt	70,000,000	pda sub Ini Sangat diharapkan agar bisa diakomodir karena ditahun 2023 baru diakomodir untuk 34 pegawai dari total pegawai 41 orang
2	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)	1 Dok	5,000,000	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)	1 Dok	50,000,000	Tambahan 5 Juta Untuk Belanja Lembur
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	137,100,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	196,000,000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Pkt)	2 Pkt	3,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Pkt)	2 Pkt	10,000,000	
2	Penyediaan Peralatan Dan perlengkapan Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Pkt)	2 Pkt	4,500,000	Penyediaan Peralatan Dan perlengkapan Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Pkt)	2 Pkt	10,000,000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Pkt)	1 Pkt	5,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Pkt)	1 Pkt	15,000,000	
4	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Pkt)	1 Pkt	27,000,000	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Pkt)	1 Pkt	35,000,000	Penambahan Untuk Belanja Kertas Dan Map
5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JumlahPaket Barang Cetak Dan Penggandaan yang disediakan (Pkt)	2 Pkt	23,100,000	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JumlahPaket Barang Cetak Dan Penggandaan yang disediakan (Pkt)	2 Pkt	35,000,000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dok)	1 Dok	1,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dok)	1 Dok	1,000,000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Lap	17,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Lap	25,000,000	
8	Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8 Lap	55,000,000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7 Lap	65,000,000	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	80,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	120,000,000	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Pkt)	1 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Pkt)	1 Unit	-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit	55,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit	65,000,000	Untuk Pengadaan Empat Buah Leptop Untuk tiga Bidang Dan bagian Keuangan
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)	1 Unit	25,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)	2 Unit	55,000,000	Penambahan 30 Juta Untuk Belanja Korden Kantor Dan Aula
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			-	161,400,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			-	161,900,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan)	12 Lap	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan)	12 Lap	1,500,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12 Lap	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12 Lap	50,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12 Lap	110,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12 Lap	110,400,000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	111,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	125,000,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya (unit)	26 Unit	76,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya (unit)	26 Unit	90,000,000	Penambahan anggaran 14 Juta Kerana Ada Penambahan 1 Buah Mobil Dapur Umum Dari BNPB-RI (BBM, Biaya Service dan Pajak)
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	10,000,000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	7 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	7 Unit	25,000,000	

2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				670,000,000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				852,000,000	
	Program Penanggulangan Bencana		Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77.78	670,000,000	Program Penanggulangan Bencana		Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77.78	852,000,000	
			Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83.85				Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83.85		
			Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	17.79				Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	17.79		
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)	-	75,000,000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)	-	105,000,000	
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi (Dok)	3 Dok	35,000,000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi (Dok)	1 Dok	45,000,000	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Riangkemie Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka terhadap Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya (Org)	120 Org	40,000,000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Riangkemie Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) Tahun (Org)	180 Org	60,000,000	
II	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				150,000,000	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				180,000,000	

1	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	'#.Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Waiula,Hokeng Jaya,Ojan Detun,Nowakote '#.Kab. Flores Timur, Titehena, Tenawahang,Konga,Leraboleng '#.Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun,Lohayang,Larantuka,Ekasapta,Amahgarapati '#.Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Riangkemie,Tiwatobi '#.Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Dan Ritaebang '#.Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga '#.Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Nimun Danibao '#.Kab. Flores Timur, Watan Ulumanda, Pandai Dan Oyang Barang '#.Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu Dan waiburak '#.Kab. Flores Timur, Withama, Tuagoetobi '#.Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Nelelamawangi Dua '#.Kab. Flores Timur, Lewolema, Bantala '#.Kab. Flores Timur, Adonara, Adonara '#.Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Harowura dan hoko Harowura '#.Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike Aimatan.#.Kab. Flores Timur.Ile Bura.Riang Rita,Dulipali,Birawan Dan Nuri	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Org)	60 Org	100,000,000	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	#.Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Waiula,Hokeng Jaya,Ojan Detun,Nowakote '#.Kab. Flores Timur, Titehena, Tenawahang,Konga,Leraboleng '#.Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun,Lohayang,Larantuka,Ekasapta,Amahgarapati '#.Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Riangkemie,Tiwatobi '#.Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Dan Ritaebang '#.Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga '#.Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Nimun Danibao '#.Kab. Flores Timur, Watan Ulumanda, Pandai Dan Oyang Barang '#.Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu Dan waiburak '#.Kab. Flores Timur, Withama, Tuagoetobi '#.Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Nelelamawangi Dua '#.Kab. Flores Timur, Lewolema, Bantala '#.Kab. Flores Timur, Adonara, Adonara '#.Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Harowura dan hoko Harowura '#.Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike Aimatan.#.Kab. Flores Timur.Ile Bura.Riang Rita,Dulipali,Birawan Dan Nuri	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	380 Org	120,000,000	
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	30 Org	50,000,000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	40 Org	60,000,000	
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100%	280,000,000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100%	350,000,000	
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 X 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dok)	1 Dok	150,000,000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 X 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dok)	1 Dok	150,000,000	
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana (Org)	50 Org	50,000,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana (Org)	50 Org	50,000,000	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Org)	100 Org	80,000,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Org)	100 Org	150,000,000	Perlunya penambahan anggaran pada sub ini guna pengadaan logistik untuk Bufer stock
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			-	165,000,000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			-	217,000,000	
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dok)	1 Dok	40,000,000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1 Dok	40,000,000	
2	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Tiwatobi Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Homa Kab. Flores Timur, Lewolema, Bantala Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Hoko Harowura Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dok)	1 Dok	30,000,000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Tiwatobi Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Homa Kab. Flores Timur, Lewolema, Bantala Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Hoko Harowura Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1 Dok	37,000,000	
3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistik Informasi Kebencanaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Bencana (Dok)	1 Dok	25,000,000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistik Informasi Kebencanaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1 Dok	40,000,000	
4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PASca Bencana (Dok)	6 Dok	70,000,000	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) Tahun (Dokumen)	6 Dok	100,000,000	

2.5 Penelaan Terhadap Usulan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah tahun 2025 ada beberapa usulan masyarakat yang berkaitan dengan rencana kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	BADA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
I	Program Penanggulangan Bencana				
1	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	'#.Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Waiula,Hokeng Jaya,Ojan Detun,Nawakote	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Org)	14 Kecamatan berdasarkan usulan dari musrembang kecamatan	usulan ini diterima karena masuk dalam RENJA BPBD tahun anggaran 2025
		#.Kab. Flores Timur, Titehena, Tenawahang,Konga,Leraboleng			
		#.Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun,Lohayong,Larantuka,Ekasapta,Amahgarapati			
		#.Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Riangkemie,Tiwatobi			
		#.Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Dan Ritaebang			
		#.Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga			
		#.Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Nimun Danibao			
		#.Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Pandai Dan Oyang Barang			
		#.Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu Dan waiburak			
		#.Kab. Flores Timur, Witihama, Tuagoetobi			
		#.Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Nelelamawangi Dua			
		#.Kab. Flores Timur, Lewolema, Bantala			
		#.Kab. Flores Timur, Adonara, Adonara			
		#.Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Horowura dan hoko Horowura			
		#.Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike Aimatatan			
	#.Kab. Flores Timur.Ile Bura.Riang Rita,Dulipali,Birawan Dan Nuri				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: ***“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”***.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi ***“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”*** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

- 3.1.1.Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
- 3.1.2.Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- 3.1.3Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.Selain itu sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan dan misi yang telah dicanangkan adalah :

- 3.2.1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (*pemerintah dan masyarakat*) dalam upaya penanggulangan bencana.
- 3.2.2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan peningkatan sarana prasarana serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- 3.2.3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana yang lebih baik.

Dalam Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan isu – isu strategis pelayanan BPBD Provinsi adalah :

- a. Belum terwujudnya kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini penyedia telekomunikasi dalam membangun sistem informasi bencana secara global melalui sistem broadcast pesan layanan singkat (SMS) kepada seluruh masyarakat tentang peringatan dini dan kejadian bencana di Nusa Tenggara Timur.
- b. Belum optimalnya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dari Sumber Daya Manusia, peralatan dan finansial dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana.
- c. Belum optimalnya pengelolaan logistik, peralatan dan pengerahan Sumber Daya Manusia serta penanggulangan bencana untuk penanganan tanggap darurat.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU-PB).

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 3.3.1. Meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat
- 3.3.2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
- 3.3.3. Mewujudkan penanganan kondisi darurat yang didukung logistik, peralatan dan pengerahan sumber daya manusia secara cepat, tepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh:
 - 3.1. Terlaksananya Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memadai bagi korban bencana
 - 3.2. Menyediakan data dan informasi bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana
 - 3.3. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan pemangku kepentingan bidang kebencanaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tujuan Pembangunan Daerah, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)

Tabel. 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Cakupan Penanganan Bencana	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Mitigasi, Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.	- Peningkatan Upaya Mitigasi,Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.
Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan public	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik 2 Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran 3 Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah 2 Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 3 Penataan sistem administrasi ASN 4 Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran jelas , terukur) dan partisipatif serta tepat waktu

3.3.Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 Sebagai Mana Tertuang Dalam rancangan Awal Perangkat Daerah Pada RKPD Mencakup 2 urusan 1 Program 12 Kegiatan Dan 37 Sub Kegiatan Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tabel 3.3.1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Prioritas/sasaran	Program	Indikator Program (Satuan)	Target	Perkiraan Maju
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	88,89	100
		Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	91,93	100
		Persentase Cakupan Rehabilitasi Dan rekonstruksi Pasca bencana (%)	18,79	19,79

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					3.963.810.000,00							2.773.610.247,00			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.963.810.000,00							2.773.610.247,00			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA					3.963.810.000,00							2.773.610.247,00			
1	1	05	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						2.415.360.247			
1	05	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	45.211.050,00			
1	05	01	2.01	0001				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							11.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	11.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	0002				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							10.711.050,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dok	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	10.711.050,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	0006				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							11.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Lap	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	11.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8 Lap	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	75.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	-	17.500.000,00	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Pkt	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dok	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	137.100.000,00			-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	-	148.335.236,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Pkt	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Pkt	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		23.335.236,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Pkt	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Pkt	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Pkt	23.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dok	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Lap	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7 Lap	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	80.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	-	0,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	161.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	-	342.300.000,00	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		50.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap	110.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		289.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-	-	86.000.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	76.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	-		11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

2	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-					670.000.000,00							358.250.000,00	
	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-					75.000.000,00							110.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				120 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Riangkemie Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dok	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-					150.000.000,00							45.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				40 Org	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota															
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					33 Kawasan	100.000.000,00	#.Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Waiula,Hokeng Jaya,Ojan Detun,Nawakote #.Kab. Flores Timur, Titehena, Tenawahang,Konga,Lera boleng #.Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun,Lohayong,Larantuka,Ekasapta,Amahgarapati #.Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Riangkemie,Tiwatobi #.Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Dan Ritaebang #.Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga #.Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Nimun Danibao #.Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Pandai Dan Oyang Barang #.Kab. Flores Timur, Adonara Timur,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-				280.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		90.000.000,00		
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota															
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			50 Org	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100 Org	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-		165.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	113.250.000,00	
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			1 Dok	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		13.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			1 Dok	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Tiwatobi Kab. Flores Timur, Solor Barat, Balaweling I Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Homa Kab. Flores Timur, Lewolema, Bantala Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Hoko Horowura Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			1 Dok	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			4 Dok	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
J U M L A H										3.963.810.000,00						2.773.610.247,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025. Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Plt.Kepala Pelaksana

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur,**



Achmad R. Dili, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008